

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat teknologi menciptakan fenomena e-commerce dimana para konsumen dapat melakukan transaksi jual beli secara online. Pertumbuhan pengguna *e-commerce* di Indonesia meningkat setiap tahun memungkinkan pertumbuhan akan terus meningkat ke tahun yang akan datang yang memunculkan e-commerce baru yaitu Grab Toko. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen *e-commerce* yang dirugikan oleh Grab Toko ditinjau dari UU ITE dan upaya penegakan hukum atas terjadinya penipuan konsumen *e-commerce*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis fenomena hukum yang terjadi di masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dari skripsi ini, pertama bentuk perlindungan hukum sesuai UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada konsumen. Beberapa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU ITE antara lain, Hak atas Informasi jelas, jujur, benar dan akurat, informasi tentang transaksi elektronik, kerahasiaan data pribadi, proteksi terhadap penipuan, hak untuk mengadu dan mendapatkan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan upaya hukum jalur litigasi dan upaya hukum jalur non-litigasi. Grab Toko terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Dalam mengimplementasikan UU ITE, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia membuat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi UU ITE. Aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman berperan penting dalam penegakan hukum dalam tindak pidana dalam transaksi elektronik. Dalam meminimalisir hambatan dalam penegakan hukum, diperlukannya kerja sama antara masyarakat, aparat penegak hukum serta lembaga yang ahli penanganan *cybercrime* dalam untuk memberantas penipuan *e-commerce*.

Kata kunci: e-commerce, Perlindungan Konsumen , UU ITE, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The rapid growth of technology has created an e-commerce phenomenon where consumers can carry out buying and selling transactions online. The growth of e-commerce users in Indonesia increases every year. It is possible that growth will continue to increase in the coming years, giving rise to a new e-commerce site, namely Grab Toko. The purpose of writing this thesis is to determine the form of protection for e-commerce consumers who are harmed by Grab Toko, a review of the ITE Law and law enforcement efforts regarding e-commerce consumer fraud. The research method used in writing this thesis is a normative juridical method by analyzing legal phenomena that occur in society based on statutory regulations. The approaches used are the statutory-regulatory approach and the case approach. The results of the discussion from this thesis, firstly, are the form of legal protection in accordance with Law no. 19 of 2016 amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions for consumers. Several forms of legal protection for consumers according to the ITE Law include the right to clear, honest, true and accurate information, information about electronic transactions, confidentiality of personal data, protection against fraud, the right to complain and obtain dispute resolution. Legal protection is divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Efforts to resolve the defense can be carried out through litigation and non-litigation legal efforts. Grab Toko has been legally proven to have committed a criminal act in accordance with Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the ITE Law. In implementing the ITE Law, the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Chief of Police of the Republic of Indonesia made a Joint Decree (SKB) regarding Guidelines for Implementing the ITE Law. Law enforcement officials including the police, prosecutor's office, lawyers and judiciary play an important role in enforcing the law in criminal acts in electronic transactions. In minimizing obstacles to law enforcement, cooperation is needed between the community, law enforcement officials and institutions that are experts in handling cybercrime in carrying out fraudulent e-commerce transactions.

Keywords: e-commerce, Consumer Protection, ITE Law, Law Enforcement